

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DAERAH,
PENERAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KETAATAN PADA
PERATURAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA DINAS
SOSIAL KABUPATEN ACEH JAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana

OLEH:

**FATIMAH ZUHRA
NPM. 18100002
PRODI AKUNTANSI**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG (STIES)
BANDA ACEH
2022**



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG (STIES)

BANDA ACEH

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Fatimah Zuhra
NPM : 18100002
Judul Skripsi : Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah
Penerapan Akuntabilitas Keuangan dan Ketaatan Pada
Peraturan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas
Sosial Kabupaten Aceh Jaya

Kami Pembimbing telah menyetujui Skripsi saudara tersebut di atas dan selanjutnya dapat diajukan kepada Panitia Komisi Ujian Komprehensif Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh.

Banda Aceh, 26 Juli 2022
Menyetujui,

Pembimbing I

Eliana, SE, M.Si
NIDN. 1310047601

Pembimbing II

Endra Gunawan, SE, M.Si
NIDN. 8833950017

Ketua Prodi Akuntansi

Intan Novia Astuti, SE, M.Si
NIDN. 1321119301



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SABANG (STIES)

BANDA ACEH

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan Dan Ketaatan Pada Peraturan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya

Fatimah Zuhra

NPM : 18100002

Prodi : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Skripsi pada Tanggal 27 Juli 2022 dinyatakan telah memenuhi syarat untuk disahkan.

Panitia Komisi Ujian

Eliana, SE, M.Si

Ketua

Endra Gunawan, SE, M.Si

Sekretaris

Dra. Nurhayati, M.Si, Ak, CA

Anggota

Intan Novia Astuti, SE, M.Si

Anggota

Banda Aceh, 27 Juli 2022
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES)
Banda Aceh
Ketua,

Banta Karollah, SE, MSM
NIDN. 0120056801

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menjalankan tugas dan aktivitas sehari-hari dalam mengikuti perkuliahan sampai dengan penyelesaian penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebahagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang Banda Aceh.

Saya menyadari sepenuhnya sebagai manusia yang lemah dan tidak luput dari kesalahan serta kekhilafan khususnya dalam penulisan skripsi ini yang mungkin disana-sini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, maka pada tempatnya saya mengharapkan masukan ataupun kritikan yang membangun dari para ilmuwan dan atau pihak lainnya atas skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan ilmu Akuntansi khusus tentang Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah , Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan Pada Peraturan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Dinas Sosial kabupaten Aceh Jaya pada waktu yang akan datang.

Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Banta Karollah, SE, M.S.M selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di STIES Banda Aceh.
2. Ibu Intan Novia Astuti SE, M. Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sabang (STIES) Banda Aceh

3. Ibu Eliana, SE, M. Si selaku Pembimbing Pertama yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Endra Gunawan SE M. Si selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan serta saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak/Ibu dosen STIES Banda Aceh, yang tanpa pamrih dan sepenuh hati telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada kami selama mengikuti perkuliahan dan bimbingan skripsi ini.
6. Kedua orang Tua yang sangat dicintai yang selama ini telah memberikan dukungan, bantuan baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Disamping itu, juga kepada keluarga saya yang tercinta yang penuh kesabaran telah memberikan dukungan dan perhatian yang cukup besar dalam penyelesaian perkuliahan di STIES Banda Aceh.
7. Semua teman-teman tercinta yang secara aktif telah memberikan dukungan dan bantuan sehari-hari selama perkuliahan dan bimbingan skripsi di Kampus STIES Banda Aceh. Atas bantuan yang telah diberikan, semoga ALLAH S.W.T melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua, *Amiin ya rabbal A'lamin.*

Banda Aceh, Januari 2022

Penulis

FATIMAH ZUHRA

DAFTAR ISI

Hal

COVER

| | |
|---|-------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL | vi |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| DAFTAR LAMPIRAN | viii |
| SURAT PERNYATAAN..... | ix |
| ABSTRAK..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang dan Permasalahan | 1 |
| 1.2. Masalah Penelitian | 6 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| 1.5. Skop Penelitian | 8 |
| BAB II LANDASAN TEORI..... | 10 |
| 2.1. Akuntabilitas Kinerja | 10 |
| 2.1.1. Pengertian Akuntabilitas Kinerja | 10 |
| 2.1.2. Indikator Akuntabilitas Kinerja | 12 |
| 2.2. Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah..... | 14 |
| 2.2.1. Pengertian Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah | 14 |
| 2.2.2. Indikator Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah..... | 16 |
| 2.3. Penerapan Akuntabilitas Keuangan | 18 |
| 2.3.1. Pengertian Penerapan Akuntabilitas Keuangan | 18 |
| 2.3.2. Indikator Penerapan Akuntabilitas Keuangan | 20 |
| 2.4. Ketaatan Pada Peraturan..... | 21 |
| 2.4.1. Pengertian Ketaatan Pada Peraturan | 21 |
| 2.4.2. Indikator Ketaatan Pada Peraturan..... | 23 |
| 2.5. Penelitian Terdahulu..... | 25 |
| 2.6. Kerangka Konseptual | 27 |
| 2.7. Hipotesis Penelitian..... | 30 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... | 31 |
| 3.1. Populasi dan Sampel..... | 31 |
| 3.2. Metode Penarikan Sampel | 33 |
| 3.3. Metode Pengumpulan Data | 33 |
| 3.4. Operasional Variabel | 34 |
| 3.5. Skala Pengukuran | 36 |
| 3.6. Metode Analisis Data..... | 37 |

| | |
|--------------------------|----|
| DAFTAR PERPUSTAKAAN..... | 44 |
|--------------------------|----|

DAFTAR TABEL

| | |
|--|---------|
| | Halaman |
| Tabel II.1. Penelitian Terdahulu | 25 |
| Tabel III.1. Populasi Penelitian..... | 31 |
| Tabel III.2. Skala <i>Likert</i> Pengukuran Instrumen Penelitian | 36 |

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1. Kerangka Konseptual..... 30

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fatimah Zuhra»

NIM : 1810002

Prodi : Akutansi

Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa didalam hasil penelitian /skripsi saya ini tidak terdapat bagian atau satu-kesatuan yag utuh dari skripsi, tesis disertasi buku atau bentuk lain yang dapat di pandang sebagai tindakan penjiplak. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau terdapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah olah karya asli sendiri

Apabila ternyata dalam skripsi saya bagian-bagian yang telah memenuhi unsur penjiplak, maka saya menyatakan untuk digugurkan gelar akademik sebagian atau seluruh hak gelar keserjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Banda acehJuli 2022

Fatimah Zuhra

ABSTRAK

PENGARUH KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DAERAH PENERAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KETAATAN PADA PERATURAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH JAYA

Oleh

**FATIMAH ZUHRA
NPM : 18100002**

Pembimbing I : Eliana, Se, M, Si
Pembimbing II : Endra Gunawan , Se, M,si.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban pemerintah untuk Mempertanggungjawabkan, Menyajikan, Dan Melaporkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada masyarakat. Tujuan dari adanya sistem akuntabilitas kinerja yaitu menyediakan kerangka kerja untuk mengukur hasil dan memberikan informasi dan komunikasi sehingga dapat digunakan secara efektif oleh para petinggi publik, pengambil keputusan dan manager program. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya. Maka terdapat 29 orang responden pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya yang akan diteliti. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang terdiri dari data atau sumber primer. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini menggunakan kuisioner untuk teknik pengumpulan data.

Hasil Penelitian ini Membuktikan Bahwa Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas dan Ketaatan Ada Peraturan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja. Hal Ini Dapat dijelaskan Tahun Lalu Angka Kemiskinan Aceh Sempat Bertambah 19 Ribu Orang Dari 14,99% Pada Maret 2020, Naik Menjadi 15,43% Pada September 2020

Kata Kunci : *Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Kekuatan Pada Peraturan, Akuntabilitas Kinerja.*

BAB I

PENDAH

ULUAN

1.1.Latar Belakang dan Permasalahan

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan kehendak kita bersama. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja menjadi masalah utama, karena masyarakat berharap adanya penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih dengan mempertanggungjawabkan kinerja melalui realisasi pendapatan secara jelas, tepat dan jujur (Putri, 2015). Akuntabilitas diyakini mampu mengubah kondisi pemerintahan yang awalnya tidak dapat memberikan pelayanan publik secara baik dan maksimal namun mampu menuju suatu tatanan pemerintahan yang demokratis. Adanya akuntabilitas juga diyakini dapat mengubah tatanan pemerintahan yang pada dasarnya berani untuk korupsi menjadi pemerintahan yang takut terhadap korupsi (anti korupsi). Pemerintah dengan penyelenggaraan akuntabilitas yang baik akan mudah mendapatkan perhatian serta dukungan dari masyarakat dalam semua programnya.

Wacana tentang tatanan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling penting untuk dibahas belakangan ini (Harrie, 2020). Untuk mencapai *good governance* itu sendiri, salah satu prinsip yang harus dipenuhi adalah akuntabilitas (Harrie, 2020). Sehubungan dengan hal tersebut seperangkat peraturan perundang-undangan pun telah digulirkan. Salah satunya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pengganti dari Instruksi Presiden

Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 15 Juni 1999, ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan praktik *good governance* khususnya akuntabilitas untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab (Harrie, 2020).

Adanya kepercayaan masyarakat atas apa yang direncanakan, dilaksanakan, dan diselenggarakan oleh pemerintah melalui program yang berorientasi kepada publik merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Di pihak penyelenggara, akuntabilitas mencerminkan komitmen pemerintah dalam melayani publik. Akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah daerah berbeda-beda, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut yaitu kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu kepala daerah di samping menyampaikan akuntabilitas keuangan, juga menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja dalam ukuran efisiensi dan efektivitas serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Harrie, 2020). Menurut Sofyani dan Akbar (2013) bahwa keberhasilan suatu organisasi bergantung pada kompetensi aparatur yang berada dalam organisasi tersebut. Kompetensi merupakan kemampuan untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas berdasarkan suatu standar yang telah ditetapkan (Putri dkk., 2015). Aparatur pemerintah merupakan penyangga utama instansi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan instansi. Informasi yang disajikan oleh instansi juga tidak lepas dari unsur manusia. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan yang baik agar aparatur pemerintah dapat berkualitas dan memberikan kontribusi yang maksimal.

Kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap baik buruknya kinerja suatu instansi. Semakin tinggi kompetensi aparatur pemerintah maka akan berpengaruh pada penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah secara baik dan memadai. Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga pegawainegeri sipil tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Kompetensi sebagaimana dimaksud Pasal

69 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ayat (1) meliputi: (1) Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis; (2) Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan (3) Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.

Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik (Putri, 2015). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang

bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (UU No.71 Tahun 2010). Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah atas laporan keuangan pada suatu instansi.

Ketaatan pada peraturan perundangan adalah kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat agar dapat mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara (Razi, 2017). Penerapan akuntabilitas keuangan tentunya akan mempengaruhi kinerja instansi pemerintah. Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan akuntabel dibutuhkan salah satu indikasi yang sangat perlu diperhatikan yaitu pengembangan penerapan sistem akuntabilitas yang tepat, jelas dan nyata. Alat yang digunakan untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan akuntabilitas dibuat untuk memenuhi kewajiban kepada pemerintah pusat dan pemenuhan kebutuhan informasi publik (Putri dkk., 2015). Sofyani dan Akbar (2013) mengemukakan bahwa LAKIP dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam melakukan perbaikan atas program kerja untuk tahun berikutnya.

Demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan suatu paket perundangan di bidang keuangan negara sekaligus sebagai landasan hukum bagi reformasi pengelolaan keuangan

negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pelaksanaan tanggungjawab dan pengelolaan keuangan. Selain itu juga ada peraturan perundangan di bidang pelaksanaan otonomi daerah dan pengelolaan daerah. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna. Perlunya sistem pertanggungjawaban daerah atas segala proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah.

Penerima bantuan sosial (Bansos) di Aceh pada tahun 2020 lalu sebanyak 1.170.667 keluarga penerima manfaat (KPM). Berdasarkan hasil pemeriksaan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh, data 84.666 penerima bantuan tersebut tidak valid (invalid). Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya, SE., Ak., MM., CA., QIA, dalam paparannya pada Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Tingkat Aceh Tahun 2021, di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Senin (2/6/2021).

“Selain itu, ada juga penerima bansos yang beririsan dengan BLT (bantuan langsung tunai) dana desa sebanyak 34.743 KPM, BST (bantuan sosial tunai) sebanyak 15.963 KPM, PKH (program keluarga harapan) 5.547 KPM, dan yang exclusion error (kesalahan pengecualian) sebanyak 3.636 KPM,” rinci Indra dalam

paparannya berjudul ‘Perencanaan Penganggaran, serta Capaian Kinerja BPKP dalam Mengawal Pencapaian Pembangunan Daerah’ tersebut.

Rakor yang dibuka Gubernur Aceh, Ir. H. Nova Iriansyah MT., secara virtual dari Pendopo Gubernur, itu dihadiri Sekda Aceh, dr Taqwallah MKes, Direktur I Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Didik Agung Wijanarko, Inpektur IV Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, Drs. Arsan Latif, M.Si., QIA., CGCAE., Deputy Kepala BPKP, bupati/wali kota, sejumlah Kepala SKPA, kepala inspektorat kabupaten/kota, dan instansi teknis lainnya. Karena masih banyak penyaluran bansos yang belum efektif, kata Indra, membuat penurunan angka kemiskinan Aceh menjadi lamban. Salah satu dampaknya, tahun lalu angka kemiskinan Aceh sempat bertambah 19 ribu orang dari 14,99 persen pada Maret 2020, naik menjadi 15,43 persen pada September 2020.

Fenomena dan permasalahan di atas membuktikan bahwa masih belum maksimalnya kinerja pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh dalam penyaluran bantuan dana sosial, salah satunya penyaluran bansos yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya di tahun 2020 yang lalu. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DAERAH, PENERAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN KETAATAN PADA PERATURAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH JAYA.”**

S

1.2.Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan dan Ketaatan pada Peraturan secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya?
2. Apakah Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya?
3. Apakah Penerapan Akuntabilitas Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya?
4. Apakah Ketaatan pada Peraturan secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan dan Ketaatan pada Peraturan secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya.
3. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya.

4. Untuk mengetahui pengaruh Ketaatan pada Peraturan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:

1.4.1. Manfaat Praktis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dalam mempertanggungjawabkan hasil kinerja di setiap instansi pemerintahan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan variabel sesuai dengan judul penelitian ini yaitu kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan terhadap akuntabilitas kinerja.

1.4.2. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan untuk peneliti selanjutnya mengenai pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan terhadap akuntabilitas kinerja. Sehingga dapat menjadi referensi baru untuk penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut atau sejenis. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi generalisasi pada penelitian sejenis menggunakan objek yang berbeda.

1.5. Skop Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil skop pada bidang ilmu ekonomi dengan konsentrasi akuntansi sektor publik sesuai dengan judul penelitian ini yaitu pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan terhadap akuntabilitas kinerja pada dinas sosial Kabupaten Aceh Jaya. Dinas sosial Kabupaten Aceh Jaya ini sendiri beralamat di Jalan Teuku Umar Gp. Blang Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya.

